BAB II

MORAL HAZARD PADA PEMBIAYAAN

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹ Sedangkan menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.² Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005, h, 260.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 160

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³ Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

³ Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h, 73.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII PRESS, 2004, h. 163

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentudengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh ketelitian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti kredit macet. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yakni aman, lancar dan menguntungkan.

⁵Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam www.scribs.com.Diakses 15 April 2017

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.⁶

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitumeliputi⁷

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

⁶Ridwan,Manajemen..., h. 164.

⁷ Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h, 46.

2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non performing loan*).
6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:

1. Mencari keuntungan (*profitability*) yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah.

2. Safety atau keamanan yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
3. Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
4. Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin banyak peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:⁸

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Kegunaan

1. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h, 99.

2. Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya.

b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Pembiayaan Perdagangan, Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Jenis Pembiayaan dilihat dari Jangka

Waktu

1. *ShortTerm* (Pembiayaan Jangka Pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
2. *Intermediate Term* (Pembiayaan Jangka Waktu Menengah) adalah suatu bentuk

pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.

3. *Long Term* (Pembiayaan Jangka Panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
4. *Demand Loan* atau *Call Loan* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

d. Jenis Pembiayaan dilihat dari Segi Jaminan

1. Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.
2. Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini.

5. Proses Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan

yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih.

Dalam proses pembiayaan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu : permohonan, analisa rasio, persetujuan pembiayaan, pencairan, dan monitoring⁹.

a. Permohonan Pembiayaan

Merupakan tahap awal dari proses pembiayaan, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis oleh nasabah kepada *officer* bank. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang kekurangan modal. Tidak mesti dari nasabah, tetapi juga dapat muncul dari *officer* bank.

Hal-hal yang dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain :

1. *Trend* Usaha
2. Peluang bisnis
3. Reputasi bisnis perusahaan atau perorangan
4. Reputasi manajemen

Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka dapat diteruskan dengan pengumpulan data dan *investigasi*. Namun apabila

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syaria*''ah, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, h. 154.

permohonan pembiayaan ditolak, maka harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Penolakan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan untuk *efisiensi* waktu.

b. Pengumpulan Data dan *Investigasi*.

Data yang diperlukan dalam pembiayaan konsumtif antara lain :

1. Kartu identitas calon nasabah
2. Kartu identitas suami/istri
3. Kartu keluarga dan surat nikah
4. Slip gaji terakhir
5. Surat-surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS
6. Salinan rekening bank tiga bulan terakhir
7. Salinan tagihan rekening listrik dan telepon
8. Data obyek pembiayaan
9. Data jaminan

Sedangkan dalam pembiayaan produktif data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha calon nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diterima.

Data-data yang diperlukan dalam pembiayaan produktif antara lain :

- 1) Untuk calon nasabah perorangan :
 - a) Legalitas usaha

- b) Kartu identitas calon nasabah
 - c) Kartu identitas suami/istri
 - d) Kartu keluarga dan surat nikah
 - e) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - f) *Past performance* satu tahun terakhir
 - g) *Business plan*
 - h) Data obyek pembiayaan
 - i) Data jaminan
- 2) Untuk calon nasabah berbadan hukum :
- a) Akte pendirian usaha
 - b) Legalitas usaha
 - c) Identitas pengurus
 - d) Laporan keuangan dua tahun terakhir
 - e) *Past performance* satu tahun terakhir
 - f) *Business plan*
 - g) Data obyek pembiayaan
 - h) Data jaminan .
- c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengamankan pemberian modal yang akan diberikan melalui klasifikasi dan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada. Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Metode yang sering

digunakan adalah metode analisis 5 C¹⁰ yaitu menyangkut : character, capacity, capital, collateral, dan condition¹¹.

1) *Character* (karakter)

Character merupakan watak dan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi : kejujuran, ketulusan, ketajaman berfikir, logika berfikir kepatuhan akan janji kesehatan, kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan dan suka atau tidak suka berjudi.

2) *Capacity* (kapasitas atau kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian calon nasabah meliputi : kemampuan bidang management, keuangan, pemasaran dan teknis.

3) *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya.

¹⁰ Sigit, Prihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, Solo: CV Aneka, 1995, h. 41.

¹¹ Zulkifli, *Panduan ...*, h. 144.

Penilaian terhadap capital dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal, dan penggunaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang jaminan yang dititipkan sebagai jaminanterhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi resiko pemberian pembiayaan.

5) *Condition* (kondisi)

Condition adalah kondisi sosial ekonomi suatu saat dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.

d. Persetujuan

Persetujuan merupakan proses penentuan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau tidak disetujui. Proses persetujuan ini juga tergantung pada kebijakan bank, yang disebut komite pembiayaan. Komite pembiayaan merupakan tingkat paling akhir dari persetujuan pembiayaan. Karena itu hasil akhir dari komite pembiayaan adalah penolakan, penundaan atau persetujuan pembiayaan.

e. Pengumpulan data tambahan

Pengumpulan data tambahan sebagai pemenuhan persyaratan merupakan hal terpenting sekaligus

merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan biaya.

f. Pengikatan

Setelah semua persyaratan dipenuhi selanjutnya adalah proses pengikatan jaminan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yaitu pengikatan bahwa tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan bahwa tangan adalah penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pengikatan *notariel* adalah proses penandatanganan akad antara bank dan nasabah yang dilaksanakan oleh notaris.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa apabila bermuamalah tidak secara tunai hendaklah ditulis, agar lebih terjaga jumlah dan waktunya dan lebih menguatkan saksinya, hal tersebut diterangkan dalam surat Al-Baqarah : 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
 وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
 فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
 مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, janganlah

penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada dua laki-laki maka seorang laki-laki dengan dua orang perempuandiantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya, dan janganlah saksi-saksi itu menlolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik kecil ataupun besar yang demikian itu lebih adl disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu pada

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankandiantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi, jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah pada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: (2) 282).

g. Pencairan

Sebelum melakukan pencairan pembiayaan harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelegkapan yang harus dipenuhi sesuai diposisi komite pembiayaan pada permohonan pembiayaan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan.

h. Monitoring

Monitoring adalah proses akhir dari sebuah pembiayaan. Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan business plan yang telah dibuat

sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam monitoring antara lain memantau mutasi rekening koran nasabah, memantau pelunasan angsuran, kunjungan rutin kelokasi usaha nasabah, pemantauan terhadap perkembangan usaha sejenis.¹²

6. Konsep Islam dalam Pembiayaan atau Hutang-Piutang

prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam atau bermuamalah sebagai berikut :

1. Prinsip kebersihan harta dalam ekonomi Islam harus melalui proses yang halal, jauh dari sifat ribawi.
2. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini berkaitan dengan kebebasan manusia dan tanggung jawab sosial.
3. Prinsip kemurahan hati dan moralitas, manusia beriman memiliki tanggung jawab sosial yang amat besar didasarkan atas kasih sayang terhadap oranglain¹³.

¹² Zulkifli, *Panduan...*, h. 154.

¹³ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wacana Fikih*, Bandung : Rosda Karya, 2002, h. 124.

Dalam berhutang atau pembiayaan orang yang menerima modal harus memiliki etika yang baik. Zainal Abidin dalam karya ilmiahnya berjudul : *Etika Dalam Utang-Piutang*, menerangkan bahwa etika dalam melakukan transaksi hutang-piutang adalah¹⁴ :

1. Berhutang dengan niat baik, barang siapa yang berhutang dengan niat dan azam untuk menunaikannya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasinya dan barang siapa berhutang tidak disertai niat baik, maka Allah akan membinasakannya dengan hutangnya tersebut. Adapun yang termasuk tujuan yang buruk dalam berhutang atau menerima pembiayaan antara lain : berhutang untuk menutupi hutang yang tidak dibayar, berhutang untuk bersenang-senang, dan berhutang dengan niat meminta.
2. Wajib membayar hutang. Hutang merupakan amanat yang dipundak penghutang yang baru tertunaikan (lunas) dengan membayarnya.
3. Berusaha mencari solusi sebelum berhutang, apabila telah berusaha mencari solusi selain dari hutang dan tidak ditemukan solusinya selain

¹⁴ Zainal, Abidin, *Etika Dalam Utang-Piutang-As-Sunah*, Majalah Ilmiah Pondok Pesantren As-Sunah, Karangayar Solo : Edisi 05 / Tahun IX / 1424 H / 2003 MJ. H. 16.

dengan berhutang maka hutang menjadi alternatif terakhir.

4. Menggunakan uang dengan sebaik mungkin dan menyadarinya sebagai amanah yang harus dikembalikan.

Sedangkan bagi pemberi modal hendaknya memiliki etika sebagai berikut:

1. Memberi keringanan dalam hal jatuh tempo, pemberi pinjaman hendaknya memberi kelonggaran waktu pembayaran sampai penghutang betul-betul mampu membayarnya.
2. Memberi keringanan dalam jumlah pembayaran.
3. Apabila orang yang hutang terhimpit kesulitan hendaknya menghalalkan hutang tersebut sehingga terbebas dari himpitan hutang. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Makaberilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah(2) : 280)

Sedangkan orang yang mampu membayar akan tetapi ia menundanya, ia berarti telah dzalim dan berdosa, baginya diperbolehkan untuk dipaksa membayarnya atau boleh dihukumkan (penyelesaian melalui jalur hukum). Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (penyimpangan atau moral *hazard* terhadap pembiayaan), maka dalam sebuah transaksi hutang-piutang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghindari tirani, sombong, dan serakah
2. Adanya jaminan dan saling percaya
3. Mematuhi perjanjian
4. Tidak menipu
5. Mempelajari transaksi, apabila ragu-ragu jangan bertransaksi.
6. Toleransi

B. Moral Hazard

1. Pengertian Moral Hazard

Moral berasal dari kata latin “mos” (bentuk jamaknya yaitu “mores”) yang berarti adat dan cara

hidup,¹⁵ atau dengan kata lain adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral di terjemahkan sebagai ajaran baik buruk yang di terima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb. akhlak, budi pekerti, susila¹⁶. Selanjutnya moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang di gunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat di katakan benar, salah, baik, atau buruk

Disamping itu, moral juga didefinisikan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik danburuk;
2. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dansalah;
3. Ajaran atau gambaran tingkah laku yangbaik.¹⁷

Berdasarkan kutipan diatas, dapat di pahami bahwa moral adalah istilah yang di gunakan untuk

¹⁵ Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, h. 5.

¹⁶ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 754

¹⁷ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, cet. II, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997, h. 90.

memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari di katakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang di maksudkan adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik. Singkatnya moral adalah sesuatu hal yang mengatur kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruknya perbuatan selaku manusia.

Arti *hazard* adalah bahaya: Suatu situasi yang dapat menambah terjadinya kerugian (*loss*) si tertanggung (*insured*) misal Kondisi lingkungan tak sehat, rumah tak dijaga.¹⁸

Sedangkan istilah *hazard* itu sendiri merupakan “*a think can be dangerous or cause damage: a danger or risk*”,¹⁹ yang dapat diartikan bahwa berfikir atas sesuatu yang dapat menimbulkan suatu bahaya atau yang dapat menyebabkan kerusakan maupun risiko. *Hazard* merupakan istilah yang di gunakan untuk menyatakan tentang sesuatu perbuatan yang dapat

¹⁸ T. Guritno, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Ingris-Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, h. 137.

¹⁹ Jonathan Crowter, *Oxford: Advanced & Learner's Dictionary*, cet.V, Amerika: Oxford University Press, 1995, h. 549.

membahayakan. Dengan kata lain, *hazard* itu juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan/meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.²⁰

Jadi, moral *hazard* adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata. Dalam lapangan kajian tentang akhlak, moral *hazard* lazim di sebut dengan akhlak buruk (*akhlak al-madzumah*), sebagai kebalikan dari akhlak yang baik (*akhlak al-mahmudah*). Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa *hazard* itu termasuk sifat-sifat *muhlikat*, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Pada dasarnya moral *hazard* itu merupakan maksiat karena maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan. Sebagaimana tersebut dalam Qismu al-Buhutsi wal Manhaj bi Daarinnajah “ maksiat itu adalah meninggalkan/melupakan suatu ketaatan atau bisa dikatakan meninggalkan perintah dan menjalankan apa yang dilarang”.

²⁰ A. Hasyim Ali, dkk, *Kamus Asuransi*, cet.II, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 141.

Ciri-ciri moral *hazard* sulit diidentifikasi, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti, tidak rapi, tidak bersih, keadaan dimana peraturan keamanan / keselamatan kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya (tidak disiplin). Ciri lain dari moral hazard ialah sulit diperbaiki/dirubah, karena menyangkut sifat, pembawaan ataupun karakter manusia. Apabila moral *hazard* yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggungan sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, kurang hati-hati, masih dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan mengenakan excess/risiko sendiri, memberlakukan warranty tertentu dan sebagainya. Moral *hazard* terjadi ketika pihak yang terisolasi dari risiko perilaku yang berbeda dari itu akan bersikap jika telah sepenuhnya terkena risiko. Moral *hazard* muncul karena seseorang atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab tindakan, dan karena itu memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati daripada seharusnya, meninggalkan pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.

2. Moral *Hazard* Jika Dilihat Dari Etika Bisnis Syariah.

Sistem ekonomi Islam memiliki ciri khas dan kekhususan tersendiri dibanding sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam memiliki spirit yang unik, yaitu ekonomi ketuhanan, etika dan kemanusiaan²¹.

a. Sistem ekonomi berdasarkan ketuhanan

Allah-lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada didunia ini: langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya, baik benda hidup maupun mati, yang berfikir maupun tidak berpikir, manusia dan non manusia, yang terlihat maupun yang tidak terlihat.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰءُوْا بِمَا
عَمَلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Artinya “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di-bumi. Dia akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan

²¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 51.

pahala yang lebih baik(surga). (QS. An-najm(53):31)

Seluruh harta adalah milik Allah. Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-hambaNya. Sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis. Dengan demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang dinamakan *homo economicus*. Akan tetapi, dengan tegas memberi batasan bahwa semangat ekonomi tidak sampai menimbulkan nafsu serakah yang jahat.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah

berbuat baik padamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashas (28):7)

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa hak milik yang timbul karena usaha ekonomi menjadi hak milik seseorang haruslah mencakup pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan, dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum.²² Secara tersirat, ayat ini menegaskan bahwa manusia agar tidak melupakan bagianduniannya, dalam hal ekonomi. Segala usaha atau segala kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhannya akan di pertanggungjawabkan dihadapan Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, dalam hal ini disebut dengan ekonomisyariah.

²² Abdullah Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, Bandung: Pustaka Seetia, 2002, h. 106

b. Sistem Ekonomi Berdasarkan Etika

Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan islami.²³ Islam adalah risalah yang di turunkan Allah melalui rasul untuk membenahi akhlak manusia, sebagaimana dalam hadist di terangkan bahwa (“Sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak”). Berkenaan dengan ini, Islam tetap mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengintegrasikan akhlak, etika dan norma-norma agama dalam setiap kegiatan ekonominya. Begitu pula, integralisasi nilai-nilai akhlak dalam praktik ekonomi Islam harus di realisasikan juga dalam setiap langkah-langkah ekonomi Islam, baik produksi, distribusi dan konsumsi.

Pada lapangan produksi yaitu tidak mengambil sesuatu yang haram dan tidak pula melakukan cara-cara yang haram. Pada lapangan distribusi, setiap hasil

²³ Qardhawi, *Norma ...*, h. 51.

yang sesudah tercapai dapat dibagi-bagi menurut cara yang di rihai Allah, menentukan kemana dan untuk apa harta benda yang di perolehnya itu di pergunakan. Kemudian pada lapangan konsumsi, yaitu sanggup membatasi dirinya dalam kebutuhan yang tidak berlebih-lebihan.baik kebutuhan primer maupun sekunder

c. Sistem ekonomi berdasarkan kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Yang dimaksud manusia di sini ialah semua golongan manusia,baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, senang atau susah serta manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat.²⁴Jika sistem ekonomi Islam itu bersandarkan kepada nash Al-Quran dan as-Sunnah yang berarti nash ketuhanan maka manusialah berperan sebagai yang di serukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, dan memindahkannya dari teori untuk di aplikasikannya dalam praktik. Dalam ekonomi manusia adalah tujuan dan sarana.Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya,

²⁴ Ibid.,

terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia. Berkat izin Allah, manusia bisa bekerja. Manusia adalah yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَنْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ
مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan manusia pula yang di jadikan Allah sebagai pemakmur bumi. Mereka berkata” Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?” Dia berfirman “ sungguh , aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS.Al-Baqarah(2):30)

Dalam sistem ekonomi kemanausiaan, manusia merupakan suatu tujuan dan sarana. Dalam hal ini bahwa sasaran/tujuan ekonomi Islam adalah berorientasi kepada kesejahteraan bersama, di mana ekonomi merupakan pilar dari fase kehidupan

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana uraian dari sistem ekonomi di atas, tentu kita mengetahui bahwa dalam mencari kebutuhan hidup maka ada batasan-batasan yang telah mengatur pola kehidupan manusia dalam bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari bahwa moral *hazard* merupakan bukan dari tindakan ekonomi Islam, karena moral *hazard* dilakukan semata-mata dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan baginya sendiri, sedangkan pihak lain di rugikan. Apabila dikaitkan dengan ciri ekonomi Islam, moral *hazard* tidak mencapai kepada ciri-ciritersebut.

Pada ekonomi ilahiah, moral *hazard* sudah barang tentu sudah keluar dari ajaran Allah yang menghendaki umatNya mencari rizki yang halal. Dalam ekonomi etika yang menghendaki kita mempunyai akhlak yang mulia pada setiap kegiatan perekonomian yang kita jalani, moral *hazard* tidaklah mencerminkan akhlak mulia. Pencapaian moral *hazard* pada ekonomi kemanusiaan juga tidak terealisasikan, karena dengan moral *hazard* nilai-nilai sosial, keadilan, kebenaran dan lain-lain tidak dihiraukan.

3. Sebab Terjadinya Moral Hazard Pada Pembiayaan

Terjadinya moral *hazard* pada pembiayaan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan sistem dan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan (moral *hazard*) dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak lembaga keuangan atau perbankan sendiri, ataupun kesengajaan yang mungkin dilakukan oleh debitur, moral *hazard* pada pembiayaan dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin akan terjadi dimasa datang seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, dan bencana alam. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan modal.

Dalam prakteknya moral *hazard* pada pembiayaan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Dari Pihak Perbankan (faktor *intern*)

Dari faktor *intern* moral *hazard* pembiayaan terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Moral *hazard* pada Pembiayaan juga dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak nasabah, sehingga analisis dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.²⁵ Bank-bank di Indonesia banyak yang tidak memiliki analisis yang tangguh dan terspesialisasi menurut bidang-bidang industri atau usaha-usaha tertentu. Keadaan tersebut membuat bank gampang dibohongi oleh nasabah untuk merekayasa kelayakan usahanya. Terbongkarnya kasus konglomerat kita yang terjerat hutang merupakan bukti yang tidak terbantahkan terhadap lemahnya analisis kelayakan usaha nasabah dan kemungkinan

²⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 129.

terjadinya kolusi antara pihak bank dengan calon nasabah.²⁶

2. Dari pihak nasabah (faktor *ekstern*)

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu:

- a. Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.
- b. Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam usahanya.²⁷

Terjadinya masalah pada pembiayaan (*moral hazard*) adalah akibat kesulitan-kesulitan keuangan yang dialami oleh nasabah. Kesulitan-kesulitan tersebut timbul karena berbagai faktor. Faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah karena *inefisiensi* pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan lemah dalam mengelola perusahaan, kelemahan dalam control, atau kesalahan dalam menentukan kebijakan

²⁶ Tjiptono Darmadji, *Melacak Jejak Kredit Macet*, Yayasan Sembada Swakarya Jakarta, Informasi dan Peluang Bisnis Swasembada, Edisi SWA I/VIII-April 1992, h. 16.

²⁷ *Ibid.* h. 17.

perusahaan. Adapun kesulitan-kesulitan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :*Manajerial Factor (Intern Factor)* dan faktor *ekstern (Eksternfactor)*.²⁸

1. *Manajerial factor (intern factor)*

Keberhasilan sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keberhasilan pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan yang *capable* akan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya ketidakmampuan manajemen akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan perusahaan, terutama kesulitan dalam keuangan.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Kelemahan dalam melakukan kebijakan pembelian dan penjualan.
- b. Lemahnya kontrol atas biaya dan pengeluaran.
- c. Kebijaksanaan piutang yang tidak baik.
- d. Penempatan aktiva tetap yang berlebihan.

²⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993, h. 279.

e. Permodalan yang tidak cukup.²⁹

2. Faktor ekstern (ekstern factor)

Kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan tidak hanya terjadi karena faktor manajerial saja. Meskipun pimpinan perusahaan telah bekerja dengan baik dan perkembangan usaha berjalan dengan lancar, kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan dapat terjadi karena faktor ekstern perusahaan. Faktor ekstern merupakan kondisi-kondisi di luar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Kondisi-kondisi penting yang harus diperhatikan adalah perihal *yuridis formal* dan sistem birokrasi, iklim politik, situasi perekonomian, sistem nilai pada masyarakat, perkembangan teknologi dan situasi persaingan bisnis.

Adapun kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor ekstern dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Bencana alam
- b. Peperangan
- c. Perubahan ekonomi dan perdagangan
- d. Perkembangan teknologi.³⁰

²⁹*Ibid.* h. 280

4. Upaya Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan

Moral *hazard* timbul bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan-lahan yang didahului tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) tanda-tanda penyimpangan tersebut berasal dari sejumlah variabel, antara lain kondisi keuangan debitur, kondisi bidang usaha, sikap debitur, sikap bankir dan *bankingenvironment*.

Pengelolaan moral *hazard* pada pembiayaan juga penting karena reputasi atau nama baik sebuah lembaga keuangan atau bank sering dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang sedang bermasalah hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat ataupun kalangan perbankan sendiri terhadap lembaga keuangan atau bank tersebut sehingga akan mempengaruhi aktivitas usahanya secara keseluruhan. Karena alasan tersebutterjadinya moral *hazard* pada pembiayaan dapat menjadikan beban psikologis bagi manajemen.³¹Pengelolaan moral *hazard* pada

³⁰*Ibid.* h. 281

³¹ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 101.

pembiayaan memerlukan cara-cara dan perhatian yang lebih khusus. Hal itu disebabkan proses pengelolaan masalah penyimpangan terhadap pembiayaan jauh lebih sulit dibandingkan dengan proses pemberian biaya. Pada prinsipnya pengelolaan masalah penyimpangan terhadap pembiayaan dapat dilakukan dengan :

1. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi merupakan pekerjaan yang sulit dalam pengelolaan penyimpangan pada pembiayaan . Pengusaha yang diberi modal seringkali tidak kooperatif dan bahkan enggan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Sehingga diperlukan informasi dari sumber yang lain seperti berkas nasabah.

Informasi dasar yang diperlukan dalam pengelolaan pembiayaan adalah informasi-informasi sebagai berikut :

a. Hubungan bank dengan nasabah

Dengan mempelajari hubungan lembaga keuangan dengan nasabah selama ini dapat diperoleh gambaran tentang kemungkinan terbentuknya kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

b. Potensi manajemen

Gambaran mengenai potensi dan kemampuan manajemen nasabah di masa datang dapat diperoleh dengan melihat perkembangan usahanya serta kebijakan yang dilakukan dalam mengelola usahanya.

c. Laporan keuangan

Dengan menganalisis perkembangan keuangan usaha nasabah kemungkinan dapat diketahui penyebab utama terjadinya permasalahan.

d. Kekuatan dan kelemahan lembaga atau bank dari sisi hukum

Dengan melakukan tinjauan ulang terhadap dokumen-dokumen permohonan pembiayaan nasabah, diharapkan dapat mengetahui kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada yang dapat merugikan bank atau lembaga keuangan secara hukum. Jika kelemahan ditemui kita harus hati-hati dalam mengadakan hubungan atau untuk melakukan tindakan selanjutnya terhadap nasabah di masa mendatang.

e. Posisi-posisi kreditur lain

Posisi-posisi kreditur lain terhadap aset perusahaan nasabah perlu pula dipelajari. Sehingga apabila sewaktu-waktu dilakukan penjualan aset sebagai upaya penangan moral *hazard* tidak menemui

kesulitan. Sumber informasi lain yang dapat digunakan antara lain :

- 1) Industri atau pesaing-pesaing (*competitor*) nasabah.
- 2) *Suppliers* yang digunakan Nasabah lain yang kenal debitur yang bersangkutan Instansi-instansi dan lembaga-lembaga lain.³²

³²*Ibid.*, h. 103